

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN
AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI PEMODERASI
(Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang)
JURNAL TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pada
Program Magister Akuntansi**



Disusu Oleh:

Mersia Uropmabin

122200835

**MAGISTER AKUNTANSI PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA**

2024

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI PEMODERASI (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang)

dipersiapkan dan disusun oleh:

Mersia Uropmabin

Nomor Mahasiswa: 122200835

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal: 2 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) di bidang Akuntansi

SUSUNAN TIM PENGUJI

Pembimbing



Prof. Dr. Baldric Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA.

Ketua Penguji



Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Anggota Penguji



Dr. Frasto Biyanto, M.Si, Ak., CA.

Yogyakarta, 2 Agustus 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
Ketua,


Dr. Wisnu Prajogo, MBA.

UJIAN TESIS

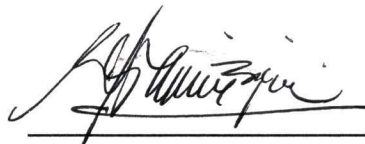
Tesis berjudul:

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI PEMODERASI (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang)

Telah diuji pada tanggal: 2 Agustus 2024

Tim Penguji:

Ketua



Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Anggota



Dr. Frasto Biyanto, M.Si, Ak., CA.

Pembimbing



Prof. Dr. Baldric Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA.

Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul:

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI PEMODERASI (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang)


diajukan untuk diuji pada tanggal 2 Agustus 2024, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian karya tulis orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan orang lain. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Program Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta batal saya terima.

Yogyakarta, 2 Agustus 2024

Saksi 1, sebagai Ketua Tim Penguji



Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Yang memberi pernyataan



Mersia Uropmabin

Saksi 2, sebagai Anggota Penguji



Dr. Frasto Biyanto, M.Si, Ak., CA.

Saksi 3, sebagai Pembimbing



Prof. Dr. Baldric Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA.

Saksi 4, sebagai Ketua STIE YKPN Yogyakarta



Dr. Wisnu Prajogo, MBA.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN
AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI PEMODERASI
(Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang)**

Mersia Uropmabin

**Graduate Program, Master of Accounting, Department Of Management
YKPN School of Business (STIE YKPN Yogyakarta, Indonesia**

***Corresponding author, e-mail: mersyauropmabin250295@gmail.com**

ABSTRACT

This study aims to examine the clarity of budget targets, accounting controls and reporting systems on the performance accountability of government agencies. Respondents in this study were budget users who were running the wheels of government in Pegunungan Bintang Regency, by serving as head of department / agency, head of finance, head of planning and programme and treasurer. The data source in this study is primary data and the type of data used is quantitative. The sampling technique uses purposive sampling with data collection methods in the form of a questionnaire (questionnaire). The data analysis technique used is using the Structural Equation Modeling (SEM) method based on Partial Least Square (PLS with two sub models, namely the measurement model / Outer Model for Validity Test and Reliability Test) and the structural model / Inner Model for the R Square test, Path Coefficients and Hypothesis Testing Model. The results showed that the clarity of budget targets, accounting controls and reporting systems had an effect on the performance accountability of government agencies in Pegunungan Bintang Regency, the internal control system could moderate the clarity of budget targets and reporting systems on the performance accountability of government agencies in Pegunungan Bintang Regency while the internal control system was unable to moderate accounting controls on the performance accountability of government agencies in Pegunungan Bintang Regency.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keywords: Clarity of budget objectives, accounting control, reporting system, performance accountability of government agencies, internal control system, and internal control system.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999 menandai tonggak penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia, yakni dimulainya era otonomi daerah. UU ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahannya. Sebagai konsekuensinya, tuntutan akuntabilitas publik terhadap pemerintah daerah pun semakin meningkat.

Perubahan signifikan terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004. UU ini mengubah paradigma akuntabilitas pemerintah daerah dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada pemerintah pusat (akuntabilitas vertikal) menjadi lebih berorientasi pada masyarakat (akuntabilitas horizontal). Hal ini berarti, pemerintah daerah kini harus lebih bertanggung jawab kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan utama dari reformasi birokrasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya komitmen dari instansi pemerintah, ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan, kurangnya sanksi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, integrasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat kurang dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang ada juga belum berjalan dengan baik.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang, meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang kurang memadai, dan pemahaman yang terbatas mengenai akuntabilitas kinerja, telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama beberapa tahun terakhir. Prestasi ini menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang lebih optimal. Beberapa di antaranya adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kesulitan dalam mengelola sistem informasi, serta kurangnya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya akuntabilitas. Maka, dengan adanya komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat terus ditingkatkan.

Ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, sistem pengendalian internal dan motivasi (Herawaty, 2014 dalam Febrianti *et al.*, 2019). Faktor pertama yaitu kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran mencakup pemahaman yang jelas tentang tujuan keuangan yang hendak dicapai, dengan begitu bisa dipahami oleh semua pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya dan menjadi ciri khas dalam sistem penganggaran berupa pendapatan, belanja, atau penghematan yang direncanakan untuk mencapai target yang sudah dirancang (Kenis pada tahun 1979 dan diperkuat oleh Kartika & Sukanto 2019). Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan Mile *et al.* (2023) tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian membuktikan jika kejelasan sasaran anggaran memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Ariyandani *et al.* (2020), Anisa & Hariyanto (2022), Hariyanto *et al.* (2021), Mikoshi (2020), Febrianti *et al.* (2019), dan Pratama *et al.* (2019) membuktikan jika kejelasan sasaran anggaran justru berdampak negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Faktor penting kedua dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang efektif dalam instansi pemerintah adalah penerapan pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi adalah sebuah proses mencakup strategi organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk melindungi aset dan catatan organisasi, memverifikasi keakuratan dan validitas data akuntansi, serta memastikan jika sistem pengendalian akuntansi mempunyai fungsi menjadi alat yang efektif untuk memberikan informasi yang berguna dalam memperkirakan hasil dari berbagai aktivitas informasi sistem (menurut Kholis, 2007 dalam Kartika & Sukamto, 2019). Penelitian terdahulu menurut Kartika & Sukamto (2019), Ariyandani *et al.*, (2020), Anisa & Haryanto (2022), Harianto *et al.*, (2021), Mikoshi (2020), Mile *et al.*, (2023), dan Pratama *et al.*, (2019). Hasil penelitian mereka secara konsisten menegaskan jika pengendalian akuntansi secara positif mempengaruhi tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Akan tetapi, menurut Febrianti *et al.*, (2019) hasil penelitian inkonsistensi di mana hasil penelitian membuktikan jika pengendalian akuntansi tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Salah satu elemen utama dalam memastikan akuntabilitas kinerja yang efektif dalam lembaga pemerintah melibatkan pemanfaatan sistem pelaporan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BPKP menegaskan jika sistem pelaporan berfungsi sebagai alat untuk menggabungkan dan mengawasi kinerja sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang telah ditentukan. Sistem ini mencakup pengungkapan pertanggungjawaban diberbagai tingkatan, mulai bawahan hingga atasan untuk dalam instansi pemerintah maupun organisasi untuk menjamin pengawasan hasil kerja dari perspektif akuntabilitas melalui sistem pelaporan. Penelitian terdahulu mengenai sistem pelaporan dampaknya yang berfokus pada akuntabilitas instansi pemerintah adalah menurut Kartika & Sukamto (2019), Ariyandani *et al.*, (2020), Anisa & Haryanto (2022), Harianto *et al.*, (2021) dan Pratama *et al.*, (2019). Hasil penelitian mereka membuktikan jika sistem pelaporan secara positif mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian mengenai sistem pelaporan yang inkonsistensi dengan akuntabilitas kinerja adalah menurut Mikoshi (2020), Mile *et al.*, (2023) dan Febrianti *et al.*,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(2019). Hasil penelitian mereka menunjukkan jika sistem pelaporan tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor lain yang mendukung instansi pemerintah dalam mencapai akuntabilitas yang baik adalah penerapan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal adalah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh pegawai dan kepala dinas untuk memastikan kepastian dalam pencapaian atas tujuan dalam berbagai aspek, termasuk laporan keuangan yang dapat diandalkan dan efektivitas serta efisiensi dalam kegiatan operasional pemerintah yang relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang diterapkan (Mamuaja, 2016 dalam Saputra, 2022). Penelitian yang dilaksanakan Kamil *et al.*, (2022), Simanjuntak *et al.*, (2023), Saputra (2022), Utama dan Yudianto (2019), Febrianti *et al.*, (2019), dan Kharisma *et al.*, (2021) tentang sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja yang hasil penelitian konsistensi dan berpengaruh positif. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Purba *et al.*, (2022). Hasil penelitian memperlihatkan jika sistem pengendalian internal berdampak negatif terhadap akuntabilitas kinerja.

Faktor-faktor ini berkontribusi pada lima dimensi akuntabilitas yang lebih luas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas keuangan. Penelitian ini secara khusus berfokus pada tiga dimensi utama: akuntabilitas kinerja atau manajerial, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas program. Dengan menganalisis ketiga dimensi ini, penelitian bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan publik.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Pegunungan Bintang. Penelitian ini juga akan menguji peran moderasi sistem pengendalian internal dalam memperkuat hubungan antara variabel-variabel independen tersebut dengan variabel dependen, yaitu akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana faktor-faktor internal seperti kejelasan sasaran, pengendalian, dan pelaporan, serta faktor eksternal seperti sistem

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengendalian internal, berkontribusi terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah tersebut.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teory Agensi

Michael C. Jensen dan William H. Meckling merupakan orang yang pertama kali mempopulerkan teori agensi pada tahun 1976, menggambarkan hubungan kontraktual antara dua pihak: principal dan agen. Dalam konteks ini, principal merupakan pihak yang memberi kuasa, sementara agen adalah pihak yang menerima kuasa untuk bertindak atas nama prinsipal. Teori ini berfokus pada potensi konflik kepentingan yang muncul akibat perbedaan tujuan antara prinsipal, yang berusaha memaksimalkan kepentingan mereka, dan agen, yang mungkin lebih mementingkan kepentingan pribadi.

Teori agensi juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan pengawasan. Untuk meminimalkan masalah asimetri informasi dan memastikan jika agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika antara agen dan prinsipal, serta implikasi dari keputusan yang diambil dalam konteks kebijakan publik. Teori keagenan memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis hubungan antara pemberi mandat (principal) dan penerima mandat (agen) dalam konteks pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, hubungan keagenan terjadi antara masyarakat dan DPRD, DPRD dan kepala daerah, serta kepala daerah dan kepala OPD. Instrumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJP, RPJM, RKPD, APBD, Renstra, Renja, dan DPA berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa agen menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Melalui teori keagenan, masyarakat dapat secara aktif mengawasi kinerja pemerintah daerah, memastikan penggunaan dana publik yang transparan dan akuntabel, serta mendorong pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerapan teori

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keagenan dan instrumen yang relevan diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran merupakan suatu proses yang dijalankan instansi sector public untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia (Dedi, 2008 dalam Pratama *et al.*, 2019). Salah satu ciri dari sistem penganggaran yaitu kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan supaya dipahami oleh penanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran dengan demikian bisa memotivasi pegawai untuk melaksanakan yang terbaik dalam mencapai target yang diharapkan (Menurut Kenis, 1997 dalam Pratama *et al.*, 2019). Kejelasan sasaran anggaran merupakan faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Ketika sasaran anggaran dirumuskan secara jelas, spesifik, dan mudah dipahami, maka setiap individu dalam organisasi akan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini akan mendorong mereka untuk mengarahkan upaya dan sumber daya secara efisien dan efektif guna mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian, kejelasan sasaran anggaran tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga mempermudah proses pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai. Dalam konteks pemerintahan daerah, kejelasan sasaran anggaran akan memberikan panduan yang jelas bagi para pejabat dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi merupakan komponen penting dari pengendalian internal, yang mencakup struktur organisasi, mekanisme dan alat terkoordinasi yang digunakan dalam sebuah instansi atau organisasi untuk melindungi aset, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan ketaatan pada kebijakan manajerial yang diputuskan (Baridwan, 2001 dalam Mikoshi, 2020). Prosedur

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengendalian akuntansi dimaksudkan untuk informasi keuangan harus akuntabel dengan demikian pengelola akan memperoleh informasi yang valid untuk perencanaan program dan pengambilan keputusan yang lain, aktiva dan catatan-catatan organisasi tidak dicuri, diselewengkan ataupun dirusak secara sengaja, kepatuhan pada kebijakan dan peraturan pemerintah (Bastian, 2010 dalam Mile *et al.*, 2023). Pengendalian akuntansi merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menjaga akurasi dan keandalan pencatatan keuangan suatu organisasi. Sistem ini melibatkan berbagai prosedur, catatan, dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan, penipuan, dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan, pengendalian akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Dengan adanya pengendalian akuntansi yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara transparan, efisien, dan efektif. Selain itu, pengendalian akuntansi juga dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang lebih tepat.

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan adalah suatu organisasi pemerintah atau perusahaan menyusun informasi keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak internal dan eksternal (instansi pemerintah, masyarakat dan stakeholders) dalam bentuk pelaporan (Halim, 2007 dalam Mile *et al.*, 2023). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan jika sistem pelaporan akuntansi merupakan sebuah sistem yang terdiri atas struktur organisasi, prosedur, dan rekaman yang digunakan untuk mendapatkan informasi keuangan yang sesuai, bisa diandalkan, dan waktu tepat untuk pengambilan keputusan di dalam ataupun di luar organisasi. Sistem ini juga mencakup perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan dalam suatu organisasi. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 mengenai SAP, dijelaskan jika “laporan keuangan pemerintah terdiri atas beberapa komponen, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Perubahan Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan”. Komponen-komponen ini menyuguhkan informasi yang penting tentang keuangan pemerintah dan membantu dalam memahami kinerja keuangan serta posisi keuangan pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal melibatkan pemanfaatan semua sumber daya pemerintah dengan tujuan mendorong, mengawasi, dan memantau aktivitas agar tujuan pemerintahan dapat tercapai (Li & Zhao, 2022 dan Hoai & Nguyen, 2022 dalam Simanjuntak *et al.*, 2023). Sistem pengendalian internal terdiri dari prosedur dan pengukuran yang disinkronkan dengan tujuan untuk menjaga aset, struktur organisasi dalam instansi pemerintahan antara kepala dinas dan pemerintah, melakukan audit komprehensif terhadap laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi keuangan yang kredibel, meningkatkan efektivitas, dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Mulyadi, 2017 dalam Simbolon, 2022). Sistem pengendalian internal terdiri dari lima komponen dan komponen tersebut merujuk pada metode yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasional dan terintegrasi dengan proses sistem pemerintahan yang ada yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan (Ramandei, 2009 yang dikutip dari COSO dalam Simbolon, 2022). Menurut Mardiasmo (2011) yang dikutip oleh Hutama dan Yudianto (2019), tujuan sistem pengendalian internal dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk menjaga keamanan aset negara, menguji dan memeriksa informasi akuntansi dengan teliti, meningkatkan efisiensi biaya operasional, serta memastikan kebijakan pengelolaan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ialah tanggung jawab suatu lembaga pemerintah untuk menjelaskan apakah mereka berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan organisasi mereka. Hal ini dilakukan melalui penyampaian laporan secara

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berkala tentang pencapaian sasaran dan tujuan yang sudah ditentukan (Pusdiklatwas BPKP, 2007 dalam Pratama *et al.*, 2019). Definisikan akuntabilitas kinerja mengacu dengan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP yakni sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam implementasi program dan kegiatan yang sudah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam mencapai target atau sasaran secara terukur dan ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Inpres No. 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB No. 29 Tahun 2010 mendefinisikan LAKIP sebagai dokumen yang menggambarkan perwujudan SAKIP dengan tujuan mengetahui tingkat transparansi instansi pemerintah dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis. LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah terkait penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditentukan dalam SAKIP. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempunyai sejumlah prinsip: keterkaitan, kejelasan, keandalan, objektivitas dan ketepatan waktu.

Laporan akuntabilitas merupakan alat penting bagi masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah daerah. Melalui laporan ini, masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah menggunakan sumber daya publik secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya laporan akuntabilitas, masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana publik, menilai kinerja program pemerintah dan masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Secara keseluruhan, laporan akuntabilitas berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintah transparan dan akuntabel, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah akan meningkat. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja pemerintah ditetapkan sesuai dengan sistematika dan kriteria penilaian seperti yang sudah dijelaskan pada Permenpan & RB No. 12 Tahun 2015 mengenai Evaluasi Atas Implementasi SAKIP. Evaluasi terhadap penerapan SAKIP berfokus pada kriteria yang sudah ditentukan, dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun sebelumnya.

Pengembangan Hipotesis

Simbolon (2022) berpendapat bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan suatu panduan dalam proses perencanaan untuk menetapkan anggaran berdasarkan sasaran yang jelas dan terperinci, sehingga dapat dipahami oleh para pihak yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kejelasan sasaran anggaran merupakan faktor kunci dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di pemerintahan daerah. Ketika tujuan anggaran dirumuskan secara jelas dan spesifik, maka setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran akan memiliki pemahaman yang sama mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini akan mendorong terciptanya anggaran yang lebih relevan dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kejelasan sasaran anggaran memiliki sejumlah implikasi positif yaitu meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kinerja dan memperkuat perencanaan namun ketika sasaran anggaran tidak jelas atau ambigu, maka pegawai akan merasa kebingungan dan tidak puas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kinerja dan berujung pada menurunnya akuntabilitas instansi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mile *et al.*, (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut disusun hipotesis yaitu:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H1: Kejelasan sasaran anggaran secara positif mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Pengendalian akuntansi merujuk pada prosedur atau sistem formal yang mempergunakan informasi untuk mengubah dan menjaga operasional perusahaan. Pengendalian ini adalah bagian integral dari proses manajemen perusahaan yang bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang relevan dengan tujuan perusahaan, dengan efisiensi dan efektivitas yang optimal (Hidayattullah & Herdjiono, 2015 dalam Saputra, 2021). Sistem pengendalian akuntansi sangat mempengaruhi pencapaian kinerja manajerial dan penggunaan sistem pengendalian akuntansi yang efektif dapat membantu manajemen dalam mencapai kinerja yang baik. Dengan menerapkan sistem pengendalian akuntansi yang baik akan meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, serta memotivasi para pegawai dan kepala badan/ dinas di setiap instansi untuk membuat keputusan yang tepat dalam mencapai target atau tujuan. Mile *et al.*, (2023), Pratama *et al.*, (2019), Anisa & Haryanto (2022), Kartika & Sukamto (2019), Ariyandani *et al.*, (2020) dan Mikoshi (2020) hasil penelitian menunjukkan jika pengendalian akuntansi secara positif dan signifikan mempengaruhi akuntabilitas instansi pemerintah. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut disusun hipotesis yaitu:

H2: Pengendalian akuntansi secara positif mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Dalam mengimplementasikan anggaran yang sudah ditentukan, membutuhkan sebuah sistem pelaporan yang baik untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajerial. Laporan umpan balik berguna untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan agar kinerja akuntabilitas dapat ditingkatkan. Pemerintah daerah sebagai pengelola dana publik harus memberikan informasi keuangan yang valid, reliabel, tepat waktu, konsisten, dan akuntabel. Penelitian yang diteliti oleh Pratama *et al.*, (2019), Anisa & Haryanto (2022), Harianto *et al.*, (2021), Kartika & Sukamto (2019) dan Ariyandani *et al.*, (2020) hasil penelitian membuktikan jika sistem pelaporan memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja tentang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sistem pelaporan memperlihatkan jika sistem pelaporan secara positif mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut disusun hipotesis yaitu:

H3: Sistem pelaporan secara positif mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Sistem Pengendalian Intern, seperti yang dijelaskan pada PP No. 60 Tahun 2008, merupakan sebuah rangkaian proses yang komprehensif dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara kontinyu oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, pemeliharaan aset, serta memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Unsur-unsur sistem pengendalian intern yang diatur dalam peraturan tersebut mengacu pada unsur-unsur yang sudah diterapkan dalam konteks pemerintahan yaitu lingkungan pengendalian, evaluasi resiko, kegiatan pengendalian, pertukaran informasi, dan pemantauan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal berperan penting dalam mengkoordinasikan aktivitas dan menjaga konsistensi dalam pencapaian tujuan organisasi, dapat dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin dihadapi instansi pemerintah SKPD, kualitas sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi integritas dan keandalan informasi yang disampaikan melalui sistem pelaporan, dan peran sistem pengendalian internal mampu memperlihatkan sejauh mana sistem dapat menyesuaikan antara faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD. Penelitian terdahulu Simbolon (2022) hasilnya membuktikan jika sistem pengendalian internal tidak mampu memoderasi faktor- faktor penyebab akuntabilitas kinerja instansi. Berdasarkan paparan tersebut disusun hipotesis sebagai berikut:

H4: Sistem pengendalian internal mampu memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H5: Sistem pengendalian internal mampu memoderasi pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

H6: Sistem pengendalian internal mampu memoderasi sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data numerik dari sejumlah besar responden dan kemudian menganalisis data tersebut untuk menggambarkan suatu fenomena secara objektif. Dengan kata lain, peneliti ingin memberikan gambaran yang akurat dan menyeluruh tentang suatu situasi atau kondisi tertentu berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pegunungan Bintang. Penelitian yang akan berlangsung selama satu bulan yaitu bulan Juni 2024 hingga Juli 2024. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersifat kuantitatif. Data ini diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk mengukur persepsi, sikap, dan pengalaman responden terkait dengan penerapan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei. Peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung kepada seluruh responden yang telah ditentukan, yaitu para pegawai di 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pegunungan Bintang. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 33 OPD dalam SKPD di Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Penelitian ini hanya menyebarkan angket kepada Kepala organisasi perangkat daerah, Kasubag Keuangan, Kasubag Perencanaan dan Program dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bendahara pada OPD Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 33 OPD yang menjadi sampel penelitian sehingga sampel penelitian berjumlah 132 responden.

Pengukuran Variabel

Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala interval untuk mengetahui variabel yang ada di sepanjang skala umum pada interval yang sama dan untuk mengetahui objek penelitian kuantitatif yang jelas dan terukur dengan baik. Sedangkan metode yang digunakan untuk pengukuran sikap adalah Skala *Likert*. Skala *likert* adalah suatu metode pengukuran data kuantitatif yang digunakan untuk penilaian pendapat, sikap atau persepsi seseorang mengenai objek atau subjek tentang fenomena (Ghozali, 2018 dalam Anisa dan Haryanto, 2022).

Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.3

Definisi Variabel dan Indikator Penelitian

No	Jenis Variabel	Definisi Variabel Penelitian	Indikator Penelitian
1	Kejelasan Sasaran Anggaran	Kejelasan sasaran anggaran yaitu sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik yang bertujuan supaya anggaran tersebut bisa dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suhartono dan Solichin, 2006 dalam Harianto <i>et al.</i> , 2021).	Indikator yang digunakan untuk menganalisis kejelasan sasaran anggaran antara lain, yakni: tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi (Locke & Latham, 2002 dalam Simanjuntak <i>et al.</i> , 2023).
2	Pengendalian Akuntansi	Pengendalian akuntansi merujuk pada sebuah sistem	Pengukuran pengendalian akuntansi dilaksanakan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		<p>pengendalian formal yang berdasarkan akuntansi dan digunakan oleh organisasi dalam melaksanakan kegiatan yang tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2009 dalam Pratama <i>et al.</i>, 2019).</p>	<p>dengan indikator pusat kegiatan, ruang lingkup, sifat informasi, sumber ilmu, dan pihak yang terlibat (Herawati, 2011 dalam Anisa dan Haryanto, 2022).</p>
3	Sistem Pelaporan	<p>Sistem pelaporan berguna untuk mengawasi hasil kerja yang memperlihatkan akuntabilitas dan anggaran pusat, dimana laporan yang baik (yang dibuat secara kredibel, objektif, transparan, relevan, tepat waktu, dan konsisten) mempunyai peran besar dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah serta menjadi pertimbangan dalam upaya mengambil sebuah keputusan (Zakiyudin dan Suyanto, 2015 dalam Simanjuntak <i>et al.</i>, 2021).</p>	<p>Pengukuran sistem pelaporan dilaksanakan dengan indikator lamanya waktu koreksi, penyebab adanya penyimpangan dan tindakan yang diambil (Herawati, 2011 dalam Anisa dan Haryanto, 2022).</p>
4	Akuntabilitas Kinerja	<p>AKIP atau kepanjangan dari akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah</p>	<p>AKIP dianalisis dengan indikator perencanaan kinerja, pengukuran</p>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Instansi Pemerintah	pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah dalam menanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi serta sasaran yang sudah ditetapkan dan di laporkan secara berkala melalui bentuk pertanggungjawaban melalui penyusunan laporan disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kartika dan Sukamto, 2019).	kompetensi, capaian kinerja. pelaporan kinerja, penilaian domestik, pemanfaatan informasi kapabilitas (Berdasarkan PP No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).
5	Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian intern merupakan sebuah proses yang tak terpisahkan dari tugas dan aktivitas yang dilakukan secara berkesinambungan oleh kepala dinas dalam setiap setiap organisasi perangkat daerah dan seluruh pegawai (Menurut PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP).	Pengendalian internal terdiri atas 5 (lima) komponen yang terkait dan komponen tersebut akan dijadikan sebagai indikator dalam penelitian ini, yakni: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan (Ramandei, 2009 dikutip dari COSO dalam Simbolon, 2022).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Metode Dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) sebagai metode analisis data. Pilihan metode ini didasarkan pada kemampuan PLS-SEM dalam menganalisis hubungan kompleks antar variabel laten secara simultan. Berbeda dengan regresi linier berganda yang hanya mampu menganalisis hubungan linear antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen, PLS-SEM dapat menguji hubungan kausal yang lebih kompleks, termasuk hubungan non-linear dan moderasi. *Software* yang digunakan yaitu PLS pada SmartPLS. Analisis pada PLS – SEM terstruktur dari dua sub model yakni *outer model* dan *inner model*. *Outer model* dalam penelitian ini mempunyai fungsi menunjukkan bagaimanakah indikator menggambarkan variabel laten untuk diukur yakni dengan uji validitas dan uji reliabilitas. *Inner model* berguna untuk menguji korelasi antar variabel laten dalam tatanan struktur (Ghozali dan Latan, 2015).

1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer Model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas sebuah model. *Outer model* ini dievaluasi melalui validitas konvergen dan validitas diskriminan (Ghozali dan Latan, 2015).

Uji Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen dilakukan untuk menguji hubungan antara indikator dalam mengukur konstruk. Menilai *outer model* yang memenuhi syarat validitas konvergen dapat dilihat dari, sebagai berikut:

- a. *Loading Factor* > 0,7
- b. Nilai AVE > 0,5

Uji Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan digunakan untuk memastikan adanya perbedaan dari suatu model struktural antar variabel. Validitas diskriminan dapat diukur berdasarkan pendekatan *fornell-larcker* dan *cross loading*. Model dianggap memiliki diskriminan yang baik jika:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a. cross loading > 0,7 dan memiliki hubungan antara konstruk terhadap indikatornya lebih tinggi dibanding hubungan antara konstuk terhadap indikator lain.
- b. model memliki validitas diskriminan cukup jika akar AVE pada setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi variabel konstruk terhadap variabel konstruk lain dalam model penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk mengetahui sejauh mana instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang konsisten dan bisa diandalkan. Uji reliabilitas yang dapat digunakan dalam penelitian ini mempergunakan reliabilitas konsistensi internal dengan teknik untuk mengukur konsistensi internal menggunakan Cronbach's alpha atau alpha. Suatu indikator diketahui reliabel apabila nilainya *Cronbach's alpha* > 0,70 (*Cronbach's alpha* > 0,70).

2. Uji Struktural (*Inner Model*)

Uji *inner model* dapat dikatakan juga sebagai uji model, memiliki fungsi untuk mengetahui korelasi antara variabel laten. Pada konstruksi eksogen dan endogen dapat memberikan hasil jawaban atas pertanyaan berkaitan dengan hubungan antara variabel laten yang dihipotesiskan sebelumnya. *Inner model* bertuju untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen dalam model penelitian. Model penelitian ini dilihat dari

- a. Uji Fit Model
- b. Koefisien Determinasi (*R Square*)
- c. Uji Hipotesis

Uji hipotesis berguna untuk mengetahui kebenaran atau kevalidan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Uji hipotesis dalam penelitian ini mempergunakan SmartPLS untuk hipotesis diterima atau tidak dengan melihat perbandingan *P-value* dan *original sampel* dengan standar nilai *P-value* kurang dari 5% untuk menentukan bahwa hipotesis tersebut terdukung

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian *path coefficient* (Ghozali dan Latan, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Uji Validitas Konvergen

Outer loading merupakan hasil regresi tunggal dari setiap variabel indikator pada konstruk. Sedangkan AVE digunakan untuk menguji convergent validity, yaitu sejauh mana indikator-indikator berhasil mengukur konstruk laten yang sama. Jika nilai AVE tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut memang mengukur konstruk yang sama dengan baik. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Uji Validitas Konvergen

Variabel	Item	Loading Factor	AVE	Ket
Kejelasan Sasaran Anggaran	KSA1	0.873	0.724	Valid
	KSA10	0.797		Valid
	KSA11	0.862		Valid
	KSA12	0.854		Valid
	KSA13	0.865		Valid
	KSA14	0.834		Valid
	KSA15	0.845		Valid
	KSA16	0.850		Valid
	KSA17	0.861		Valid
	KSA18	0.865		Valid
	KSA2	0.861		Valid
	KSA3	0.843		Valid
	KSA4	0.865		Valid
	KSA5	0.835		Valid
	KSA6	0.858		Valid
	KSA7	0.843		Valid
	KSA8	0.858		Valid
	KSA9	0.845		Valid
Pengendalian Akuntansi	PAK1	0.909	0.834	Valid
	PAK2	0.897		Valid
	PAK3	0.885		Valid

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	PAK4	0.938		Valid		
	PAK5	0.937		Valid		
Sistem Pelaporan	SPL1	0.903	0.768	Valid		
	SPL2	0.827		Valid		
	SPL3	0.860		Valid		
	SPL4	0.878		Valid		
	SPL5	0.883		Valid		
	SPL6	0.873		Valid		
	SPL7	0.908		Valid		
Sistem Pengendalian Internal	SPI1	0.854	0.740	Valid		
	SPI10	0.826		Valid		
	SPI11	0.837		Valid		
	SPI12	0.815		Valid		
	SPI13	0.856		Valid		
	SPI14	0.872		Valid		
	SPI15	0.868		Valid		
	SPI16	0.859		Valid		
	SPI17	0.866		Valid		
	SPI18	0.872		Valid		
	SPI19	0.892		Valid		
	SPI2	0.861		Valid		
	SPI20	0.894		Valid		
	SPI21	0.885		Valid		
	SPI22	0.872		Valid		
	SPI23	0.848		Valid		
	SPI24	0.869		Valid		
	SPI25	0.879		Valid		
	SPI26	0.858		Valid		
	SPI27	0.836		Valid		
	SPI28	0.866		Valid		
	SPI29	0.839		Valid		
	SPI3	0.875		Valid		
	SPI4	0.868		Valid		
	SPI5	0.900		Valid		
	SPI6	0.880		Valid		
	SPI7	0.804		Valid		
	SPI8	0.863		Valid		
	SPI9	0.826		Valid		
	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	AKIP1		0.937	0.850	Valid
		AKIP10		0.934		Valid
		AKIP11		0.927		Valid

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

AKIP12	0.932	Valid
AKIP13	0.916	Valid
AKIP14	0.925	Valid
AKIP15	0.932	Valid
AKIP16	0.924	Valid
AKIP17	0.919	Valid
AKIP18	0.922	Valid
AKIP19	0.938	Valid
AKIP2	0.903	Valid
AKIP20	0.923	Valid
AKIP21	0.915	Valid
AKIP22	0.910	Valid
AKIP23	0.915	Valid
AKIP24	0.925	Valid
AKIP3	0.927	Valid
AKIP4	0.907	Valid
AKIP5	0.926	Valid
AKIP6	0.902	Valid
AKIP7	0.905	Valid
AKIP8	0.928	Valid
AKIP9	0.929	Valid

Sumber: Hasil Output SmartPLS (v.3.2.9)

Tabel tersebut memperlihatkan jika nilai *loading factor* yang dihasilkan masing-masing indikator $> 0,7$ dan nilai AVE $> 0,5$. Sehingga indikator-indikator tersebut dikatakan valid sebagai pengukur variabel latennya.

Validitas Diskriminan

Hasil pengujian validitas diskriminan yang dilakukan menggunakan pendekatan *forenell-larcker* dan *cross loading*. Dalam pendekatan ini dikatakan valid apabila nilai akar kuadrat AVE suatu variabel lebih besar dari nilai korelasi antar variabel lain di dalam model penelitian.

Tabel 4.7
Nilai Fornell-Larcker Criterion

Variabel	AKIP	KSA	PAK	SLP	SPI
AKIP	0.922				
KSA	0.523	0.851			
PAK	0.488	0.587	0.913		

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SLP	0.583	0.498	0.456	0.876	
SPI	0.232	0.263	0.378	0.366	0.860

Sumber: Hasil Output SmartPLS (v.3.2.9)

Tabel 4.8
Nilai loading silang (cross loading)

Item	AKIP	KSA	PAK	SLP	SPI
AKIP1	0.937	0.497	0.458	0.555	0.253
AKIP2	0.903	0.469	0.375	0.500	0.187
AKIP3	0.927	0.466	0.444	0.520	0.234
AKIP4	0.907	0.514	0.519	0.573	0.230
AKIP5	0.926	0.440	0.448	0.546	0.208
AKIP6	0.902	0.468	0.436	0.541	0.199
AKIP7	0.905	0.484	0.463	0.540	0.223
AKIP8	0.928	0.505	0.488	0.573	0.253
AKIP9	0.929	0.453	0.408	0.524	0.174
AKIP10	0.934	0.479	0.431	0.550	0.200
AKIP11	0.927	0.504	0.483	0.541	0.217
AKIP12	0.932	0.497	0.479	0.557	0.260
AKIP13	0.916	0.466	0.427	0.524	0.178
AKIP14	0.925	0.484	0.396	0.502	0.194
AKIP15	0.932	0.448	0.427	0.517	0.168
AKIP16	0.924	0.481	0.420	0.509	0.224
AKIP17	0.919	0.525	0.492	0.540	0.222
AKIP18	0.922	0.498	0.489	0.561	0.214
AKIP19	0.938	0.498	0.462	0.538	0.253
AKIP20	0.923	0.444	0.485	0.579	0.234
AKIP21	0.915	0.432	0.438	0.534	0.163
AKIP22	0.910	0.501	0.406	0.503	0.186
AKIP23	0.915	0.493	0.445	0.520	0.193
AKIP24	0.925	0.501	0.452	0.534	0.254
KSA1	0.393	0.873	0.440	0.401	0.262
KSA2	0.468	0.861	0.561	0.417	0.238
KSA3	0.430	0.843	0.489	0.403	0.170
KSA4	0.517	0.865	0.547	0.473	0.225
KSA5	0.492	0.835	0.542	0.425	0.209
KSA6	0.398	0.858	0.469	0.431	0.223
KSA7	0.444	0.843	0.434	0.417	0.234
KSA8	0.424	0.858	0.484	0.421	0.219
KSA9	0.439	0.845	0.511	0.419	0.224
KSA10	0.392	0.797	0.430	0.396	0.161
KSA11	0.429	0.862	0.506	0.405	0.219

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KSA12	0.478	0.854	0.571	0.416	0.290
KSA13	0.474	0.865	0.530	0.380	0.162
KSA14	0.394	0.834	0.477	0.468	0.220
KSA15	0.451	0.845	0.481	0.426	0.191
KSA16	0.358	0.850	0.448	0.375	0.264
KSA17	0.511	0.861	0.526	0.473	0.234
KSA18	0.442	0.865	0.486	0.458	0.278
PAK1	0.386	0.500	0.909	0.370	0.309
PAK2	0.435	0.538	0.897	0.455	0.396
PAK3	0.453	0.530	0.885	0.370	0.329
PAK4	0.474	0.548	0.938	0.438	0.342
PAK5	0.472	0.559	0.937	0.445	0.349
SPL1	0.526	0.441	0.355	0.903	0.349
SPL2	0.516	0.437	0.429	0.827	0.255
SPL3	0.479	0.404	0.357	0.860	0.317
SPL4	0.460	0.387	0.323	0.878	0.300
SPL5	0.505	0.407	0.468	0.883	0.386
SPL6	0.543	0.500	0.431	0.873	0.296
SPL7	0.537	0.464	0.426	0.908	0.341
SPI1	0.169	0.207	0.289	0.291	0.854
SPI2	0.169	0.198	0.324	0.290	0.861
SPI3	0.219	0.243	0.379	0.328	0.875
SPI4	0.187	0.204	0.340	0.249	0.868
SPI5	0.281	0.254	0.384	0.369	0.900
SPI6	0.212	0.176	0.291	0.321	0.880
SPI7	0.160	0.233	0.232	0.308	0.804
SPI8	0.143	0.220	0.305	0.285	0.863
SPI9	0.128	0.233	0.277	0.305	0.826
SPI10	0.163	0.246	0.295	0.340	0.826
SPI11	0.177	0.226	0.313	0.350	0.837
SPI12	0.092	0.232	0.309	0.256	0.815
SPI13	0.218	0.219	0.301	0.322	0.856
SPI14	0.141	0.207	0.288	0.281	0.872
SPI15	0.182	0.213	0.376	0.257	0.868
SPI16	0.222	0.311	0.294	0.347	0.859
SPI17	0.237	0.251	0.435	0.328	0.866
SPI18	0.190	0.188	0.277	0.283	0.872
SPI19	0.211	0.192	0.331	0.319	0.892
SPI20	0.255	0.228	0.340	0.350	0.894
SPI21	0.265	0.219	0.326	0.346	0.885
SPI22	0.203	0.185	0.355	0.267	0.872

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SPI23	0.176	0.253	0.259	0.274	0.848
SPI24	0.254	0.259	0.458	0.348	0.869
SPI25	0.161	0.226	0.278	0.327	0.879
SPI26	0.169	0.200	0.329	0.282	0.858
SPI27	0.123	0.248	0.320	0.305	0.836
SPI28	0.241	0.246	0.318	0.381	0.866
SPI29	0.162	0.231	0.275	0.304	0.839

Sumber: Hasil Output SmartPLS (v.3.2.9)

Mengacu dengan tabel 4.7 dan 4.8, nilai *cross loading* pada setiap item mendapatkan nilai > 0.70 , dan juga pada setiap item mempunyai nilai terbesar ketika dikorelasikan dengan variabel latennya dibandingkan dengan pada saat dikorelasikan dengan variabel laten lainnya. Hal tersebut mengindikasikan jika setiap variabel dalam penelitian ini sudah tepat menerangkan variabel latennya dan mengindikasikan jika *discriminant validity* semua itemnya valid.

Uji Realibilitas

Realibilitas pada PLS mempergunakan nilai *Cronbach alpha* dan *Composite reliability*. Dikatakan reliabel apabila nilai *Composite reliability* $> 0,7$ dan nilai *cronbach's alpha* disarankan $> 0,7$. Berikut nilai *Cronbach alpha* dan *Composite reliability* dalam tabel 4.9 sebagai berikut.

Tabel 4.9
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
AKIP	0.992	0.993
KSA	0.978	0.979
Pengendalian Akuntansi	0.950	0.962
Sistem Pelaporan	0.950	0.959
SPA	0.988	0.988

Sumber: Hasil Output SmartPLS (v.3.2.9)

Tabel tersebut memperlihatkan jika nilai *composite reliability* semua variabel penelitian $> 0,7$ dan *Cronbach Alpha* $> 0,7$. Hasil tersebut mengindikasikan jika masing- masing variabel sudah memenuhi *composite realibility* dan *cronbach*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

alpha dengan demikian dapat ditarik kesimpulan jika keseluruhan variabel mempunyai tingkat realibilitas yang besar. Dengan demikian bisa melakukan analisis selanjutnya dengan memeriksa *goodness of fit* model dengan mengevaluasi *inner model*.

2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Uji Fit Model

Pengujian ini berguna untuk melihat kelayakan suatu model yang digunakan dalam penelitian. Model penelitian dinyatakan layak digunakan jika memiliki nilai NFI > 0,1 dan kurang dari 0,9 ($0,1 < \text{NFI} < 0,9$). Berikut hasil uji fit model yang telah dilakukan dibawah ini.

Tabel 4.10
Uji Fit Model

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.047	0.047
d_ ULS	7.547	7.660
d_ G	36.065	36.616
Chi – square	111075.617	111080.956
NFI	0,554	0.553

Sumber: Hasil Output SmartPLS (v.3.2.9)

Sesuai dengan hasil uji tersebut, diketahui nilai NFI yaitu 0,554 lebih dari 0,1 dan kurang dari 0,9 ($0,1 < 0,554$), maka model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai model yang fit dan layak digunakan.

Koefisien Determinan (**R Square**)

R Square berguna sebagai penentu besarnya kapasitas semua variabel bebasnya dimaksudkan untuk menerangkan nilai variabel terikat. Hasil uji R Square akan disajikan dalam tabel 4.11.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.11
Hasil Pengujian *R Square*

Variabel	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.472	0.442

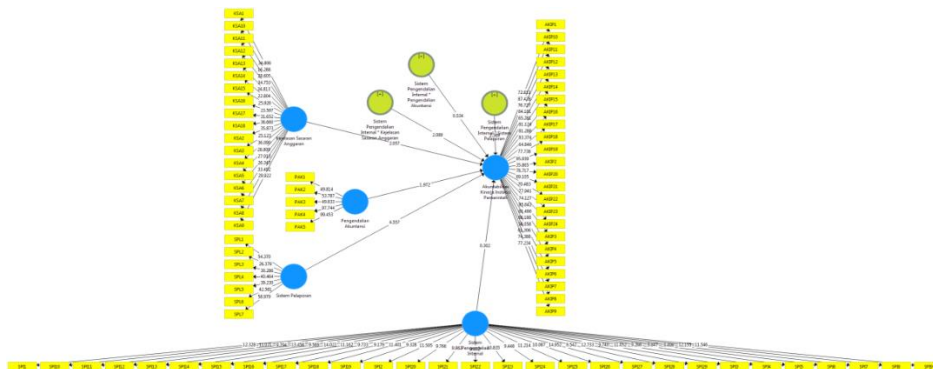
Sumber: Hasil Output SmartPLS (v.3.2.9)

Tabel tersebut memperlihatkan jika nilai *R-Square* dari variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 0,472, nilai tersebut berarti jika variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bisa diterangkan dengan variabel bebasnya adalah 47,2% dan sisanya 52,8% bisa diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan.

Uji Hipotesis

Pengujian model korelasi struktural bertujuan untuk menerangkan korelasi antara variabel-variabel dalam penelitian. Pengujian model struktural dilaksanakan dengan berbantuan SmartPLS. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis secara langsung yaitu output gambar ataupun nilai yang ada dalam output *pathcoefficients*. Ketentuan pengujian hipotesis secara langsung yaitu apabila *p value* < 0,05 (*significance level* = 5%) sehingga terdapat pengaruh signifikan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Lebih lengkapnya akan digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.2
Pengujian Hipotesis



Sumber: Hasil Output SmartPLS (v.3.2.9)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.12
Pengujian Hipotesis/ Path Coefficients

Variabel	P Values	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran -> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.040	Diterima
Pengendalian Akuntansi -> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.049	Diterima
Sistem Pelaporan -> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.000	Diterima
Sistem Pengendalian Internal * Kejelasan Sasaran Anggaran -> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.037	Diterima
Sistem Pengendalian Internal * Pengendalian Akuntansi -> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.594	Ditolak
Sistem Pengendalian Internal * Sistem Pelaporan -> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.017	Diterima

Sumber: Hasil Output SmartPLS (v.3.2.9)

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Hasil penelitian memperlihatkan jika kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai p-value adalah 0,040. Sehingga, hipotesis yang menyatakan jika kejelasan sasaran anggaran secara positif mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diterima. Sebab, nilai p-value < 0,05 mengindikasikan jika pengaruh ini tidak hanya ada, tetapi juga signifikan secara statistik.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan jika pengendalian akuntansi secara positif mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai p-value sebesar 0,049. Sehingga, hipotesis yang menyatakan jika pengendalian akuntansi memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diterima. Oleh sebab, Nilai p-value yang $< 0,05$ memperlihatkan jika pengaruh ini signifikan secara statistik.

3. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Hasil pengujian hipotesis ketiga memperlihatkan jika sistem pelaporan memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai p-value sebesar 0,000. Sehingga, hipotesis yang menyatakan jika sistem pelaporan secara positif mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diterima. Sebab, nilai p-value yang jauh di bawah 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik.

4. Sistem pengendalian internal mampu memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Hasil pengujian hipotesis keempat mengindikasikan jika sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai p-value adalah 0,037. Maka, hipotesis yang menyatakan jika sistem pengendalian internal dapat memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diterima. Sebab, p-value yang $< 0,05$ mengindikasikan jika pengaruh ini signifikan secara statistik.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Sistem pengendalian internal mampu memoderasi pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak dapat memoderasi pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai p-value sebesar 0,594. Maka, hipotesis yang menyatakan jika sistem pengendalian internal memoderasi korelasi antara pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat ditolak. Sebab nilai p-value $> 0,05$ menunjukkan jika memberikan pengaruh yang tidak signifikan secara statistik.

6. Sistem pengendalian internal mampu memoderasi sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

Hasil pengujian hipotesis keenam mengindikasikan jika sistem pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai koefisien sebesar p-value 0,017. Maka, hipotesis yang menyatakan jika sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diterima. Sebab, p-value $< 0,05$ menunjukkan jika pengaruh ini signifikan secara statistik.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terutama di daerah dengan keterbatasan seperti Kabupaten Pegunungan Bintang. Kejelasan sasaran membantu dalam perencanaan, pengendalian akuntansi memastikan efisiensi penggunaan anggaran, dan sistem pelaporan menjamin transparansi. Kombinasi ketiga faktor ini berkontribusi pada peningkatan kinerja, perolehan opini WTP, dan kualitas layanan publik. Penelitian juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal dapat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memperkuat pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pengendalian akuntansi.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus penelitian yang terbatas pada variabel-variabel tertentu dapat mengabaikan faktor-faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Kedua, generalisasi hasil penelitian mungkin terbatas pada konteks Kabupaten Pegunungan Bintang karena perbedaan karakteristik daerah. Ketiga, implementasi hasil penelitian di tingkat pemerintah daerah dapat menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, resistensi perubahan, dan kebutuhan untuk membangun konsensus.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai akan pentingnya akuntabilitas kinerja serta membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Kedua, perlu adanya perbaikan dalam sistem pengendalian internal, khususnya terkait dengan kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Terakhir, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan variabel yang diteliti. Dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti kepemimpinan, budaya organisasi, dan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.